

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoretis

1. Analisis Wacana Kritis

Kata wacana pada dasarnya merujuk pada tuturan atau perkataan yang memiliki struktur dan makna tertentu. Dalam khazanah bahasa Jawa kuno, sebagaimana dicatat oleh Wojowasito, istilah waca berarti membaca, wacaka berarti mengucapkan, dan wacana merujuk pada suatu ungkapan, sehingga sejak awal istilah ini telah berkaitan erat dengan praktik penggunaan bahasa dalam kehidupan sosial (Mulyana, 2005). Seiring perkembangan kajian kebahasaan, analisis wacana dipahami sebagai bidang yang berupaya menelaah bahasa tidak hanya sebagai sistem tanda, tetapi juga sebagai media penyampaian pesan dalam konteks teks maupun konteks sosial. Istilah *discourse* yang berasal dari bahasa Latin “discursus” memiliki cakupan makna yang sempit maupun luas. Secara sempit merujuk pada norma dan kebiasaan berbahasa dalam interaksi, sedangkan secara luas mencakup praktik penggunaan bahasa dalam tindakan sosial serta pola-pola yang menjadi ciri khas jenis bahasa tertentu (Musyafa’ah, 2017). Pemahaman inilah yang memunculkan analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis merupakan sebuah pendekatan yang tidak hanya memeriksa bentuk bahasa, melainkan juga ideologi, relasi kuasa, serta praktik sosial yang melatarbelakangi produksi wacana.

Analisis wacana kritis memandang bahasa sebagai praktik sosial yang sarat kepentingan, sehingga setiap wacana diyakini membawa nilai ideologis tertentu dan

memiliki kekuatan untuk membentuk cara pandang serta memengaruhi realitas sosial. Dalam perspektif tersebut, analisis wacana kritis berfungsi sebagai metode untuk membaca dan menafsirkan simbol-simbol bahasa secara kritis dengan kesadaran bahwa makna tidak pernah bersifat tunggal ataupun mutlak. Keragaman penafsiran yang muncul dari sebuah teks dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan kondisi produksi teks tersebut, sehingga kebenaran dalam analisis wacana hanya dapat dipahami melalui pembacaan yang komprehensif terhadap teks itu sendiri. Sebagai metode linguistik yang kritis, pendekatan ini memungkinkan pembaca tidak hanya menerima teks secara pasif, tetapi juga mempertanyakan, menolak, dan merespons konstruksi makna yang dihadirkan oleh produsen wacana. Analisis wacana kritis menegaskan bahwa bahasa merupakan sarana untuk membangun, mempertahankan, atau menantang relasi kekuasaan dalam masyarakat, sehingga subjektivitas pembaca dan penulis menjadi unsur penting dalam proses pemaknaan.

Sejalan dengan itu, Eriyanto (2001) mengemukakan sejumlah karakteristik utama analisis wacana kritis. Pertama, wacana dipahami sebagai tindakan, yakni aktivitas berbahasa yang selalu mengandung tujuan tertentu ketika seseorang berbicara atau menulis, sehingga bahasa tidak pernah hadir secara netral maupun tanpa arah. Kedua, konteks menjadi elemen yang sangat penting karena makna teks hanya dapat dipahami secara utuh melalui situasi komunikasi yang melingkupinya. Seperti siapa yang berkomunikasi, kepada siapa pesan disampaikan, dengan tujuan apa, melalui media apa, serta dalam hubungan sosial seperti apa. Ketiga, aspek historis ikut mbingkai produksi dan makna suatu wacana, sebab teks tidak

pernah berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari rangkaian peristiwa dan kondisi historis yang membentuk cara pandang produsen wacana. Keempat, wacana merupakan arena pertarungan kekuasaan, karena setiap wacana lahir dari dinamika kepentingan dan tidak ada wacana yang benar-benar bebas nilai. Kelima, ideologi menjadi unsur yang sangat mendasar karena bahasa dipahami sebagai instrumen pembentukan realitas sosial yang dapat mempertahankan atau menantang dominasi suatu kelompok atas kelompok lainnya.

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, istilah *wacana* mengalami perluasan yang signifikan dan kini digunakan secara luas dalam berbagai disiplin ilmu sosial, seperti sosiologi, antropologi, kajian budaya, psikologi sosial, hingga studi media. Dalam linguistik, wacana dipahami melalui dua perspektif besar, yaitu perspektif konvensional dan perspektif kritis, yang tidak hanya berbeda pada aspek definisional tetapi juga pada orientasi epistemologisnya. Perspektif konvensional memandang wacana sebagai satuan bahasa terlengkap dan relatif netral sehingga analisisnya lebih menekankan pada struktur bahasa dan fungsi komunikatifnya. Sementara itu, perspektif kritis melihat wacana sebagai praktik sosial yang sarat nilai, ideologi, dan relasi kuasa. Perbedaan mendasar kedua perspektif ini menjadi landasan penting untuk memahami bagaimana wacana dikonstruksi, direproduksi, dan berfungsi dalam kehidupan sosial.

Dari perspektif konvensional, wacana dipandang sebagai konstruksi bahasa yang tidak membawa ideologi dan hanya berfungsi untuk menyampaikan pesan secara jelas dan koheren. Johnstone (2002) menyatakan bahwa wacana merupakan bentuk komunikasi nyata yang menggunakan bahasa sebagai alat utama dalam

penyampaian makna. Kridalaksana (2008) mendefinisikan wacana sebagai satuan bahasa paling lengkap dalam hierarki gramatikal dan terdiri atas rangkaian kalimat yang saling terkait sehingga membentuk kesatuan makna. Fokus analisis dalam perspektif ini adalah struktur, kesinambungan, dan koherensi teks tanpa menelaah relasi kuasa yang memengaruhi produksi atau interpretasinya. Dengan demikian, perspektif konvensional cenderung memandang wacana sebagai fenomena linguistik murni yang terlepas dari konteks sosial dan ideologis.

Berbeda dengan perspektif tersebut, pendekatan kritis melihat wacana sebagai arena pertarungan makna yang tidak pernah bebas dari nilai, ideologi, serta kepentingan tertentu. Fairclough (2001), van Dijk (2001), dan van Leeuwen (2008) merupakan tokoh-tokoh penting yang berkontribusi dalam membentuk paradigma analisis wacana kritis. Mereka berpandangan bahwa setiap penggunaan bahasa selalu melibatkan praktik kekuasaan dan dapat berfungsi untuk mendominasi, mengendalikan, atau menormalkan gagasan tertentu dalam masyarakat. Wacana dalam perspektif ini tidak hanya menggambarkan realitas sosial, tetapi juga membentuk realitas melalui proses konstruksi makna yang dipengaruhi oleh posisi sosial pembuat wacana. Relasi kuasa, ideologi, dan struktur sosial yang tidak seimbang menjadi perhatian utama dalam pendekatan kritis. Oleh karena itu, perspektif ini sangat penting dalam kajian yang berfokus pada representasi kelompok marjinal, termasuk perempuan dalam wacana media.

Dalam kerangka pendekatan kritis, pemikiran Sara Mills (1997) memberikan kontribusi penting terutama dalam analisis wacana feminis. Sejalan dengan van Leeuwen yang menyoroti representasi aktor sosial, Mills menekankan bahwa

wacana selalu mengonstruksi relasi kuasa melalui cara aktor ditampilkan dalam teks. Yang membedakan Mills dari van Leeuwen adalah fokusnya pada bagaimana perempuan sering ditempatkan sebagai pihak yang termarginalkan akibat bias representasi media. Mills mengkaji secara cermat bagaimana aktor ditempatkan sebagai subjek atau objek dalam teks, karena posisi tersebut menentukan siapa yang memiliki kuasa untuk mendefinisikan peristiwa dan siapa yang hanya digambarkan oleh pihak lain. Aktor yang berperan sebagai subjek dianggap memiliki kontrol dalam membangun citra diri, sedangkan aktor yang menjadi objek berada pada posisi yang didefinisikan oleh orang lain sehingga lebih rentan terhadap pamarjinalan. Melalui model ini, Mills menegaskan bahwa struktur subjek objek tidak pernah netral dan selalu mengandung muatan ideologis. Kelebihan pendekatan Mills terletak pada perhatian khususnya terhadap posisi pembaca dalam konstruksi wacana. Ia menolak anggapan bahwa teks hanya merupakan produk pewarta atau pembuat wacana, dan sebaliknya menganggap bahwa makna yang terbentuk merupakan hasil negosiasi antara penulis dan pembaca. Dengan demikian, pembaca tidak ditempatkan sebagai penerima pasif, tetapi sebagai aktor yang turut memaknai, menafsirkan, bahkan menegosiasikan representasi yang ditawarkan oleh teks. Pendekatan ini sangat relevan dalam kajian wacana tentang perempuan, karena membuka ruang untuk memahami bagaimana stereotip gender tidak hanya dibentuk oleh media tetapi juga direproduksi melalui cara pembaca menafsirkan teks.

Fairclough (2001) menekankan hubungan antara teks dan konteks sosial, tetapi ia mengusulkan model analisis tiga dimensi yang meliputi teks, praktik

wacana, dan praktik sosiokultural. Pada dimensi teks, ia menelaah bagaimana representasi, relasi, dan identitas dibangun melalui struktur bahasa. Pada dimensi praktik wacana, ia mengkaji bagaimana teks diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi oleh masyarakat. Adapun dimensi praktik sosiokultural melihat pengaruh situasi, institusi, dan konfigurasi sosial yang lebih luas dalam membentuk wacana. Model Fairclough memungkinkan pengungkapan bagaimana proses produksi dan interpretasi teks membentuk cara masyarakat memahami realitas.

Paradigma kritis yang menjadi landasan dari pendekatan para ahli tersebut memandang dunia sosial sebagai sistem yang tidak seimbang dan sarat ketimpangan. Johnstone (2002) menjelaskan bahwa paradigma kritis berusaha mengungkap dominasi, eksploitasi, penindasan, serta praktik kekuasaan yang tersembunyi dalam struktur sosial. Pandangan ini lebih memusatkan perhatian pada kelompok yang didominasi daripada pada pelaku dominasi, sehingga fokusnya terletak pada bagaimana dominasi bekerja secara halus melalui bahasa dan praktik diskursif. Paradigma ini sangat relevan dalam analisis wacana karena membantu menyingkap aspek-aspek ideologis yang terbungkus dalam representasi yang tampak wajar. Dengan demikian, paradigma kritis memberikan landasan teoretis yang kuat untuk mengkaji wacana sebagai praktik sosial yang mengandung tujuan politis dan ideologis.

2. Analisis Wacana Model Sara Mills

Sara Mills merupakan salah satu pemikir penting dalam tradisi analisis wacana kritis yang memberikan perhatian khusus pada representasi perempuan dalam teks. Berbeda dari pendekatan linguistik tradisional yang cenderung

menyoroti struktur formal bahasa, Mills memusatkan analisisnya pada bagaimana aktor sosial ditempatkan dalam wacana dan bagaimana posisi tersebut memengaruhi cara pembaca memahami serta menafsirkan suatu teks. Menurut Mills (2011), representasi bukan sekadar gambaran linguistik, tetapi merupakan bentuk konstruksi sosial yang dapat menguatkan atau menantang relasi kuasa tertentu dalam masyarakat. Dalam konteks ini, teks memiliki peran strategis dalam membentuk persepsi, terutama ketika perempuan ditampilkan sebagai pihak yang lemah, terpinggirkan, atau kehilangan otoritas untuk menafsirkan dirinya sendiri. Pemikiran Mills kemudian berkembang menjadi apa yang dikenal sebagai stilistika feminis, yakni pendekatan yang mengungkap asumsi-asumsi gender yang tersembunyi dalam gaya bahasa tradisional. Ia berargumen bahwa bahasa tidak pernah netral; setiap pilihan kata, struktur kalimat, dan narasi selalu mencerminkan ideologi tertentu. Karena itu, analisis wacana harus memperhitungkan peran pembaca sebagai subjek aktif, bukan sekadar penerima pasif. Dalam pandangannya, pembaca berperan dalam membentuk makna melalui interaksi antara teks, konteks sosial, dan pengalaman personal. Konsep ini dipengaruhi oleh pandangan Halliday bahwa bahasa dan struktur sosial saling membentuk satu sama lain, sehingga produksi wacana tidak dapat dipisahkan dari relasi kuasa dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Bahasa, bagi Mills, bukan hanya dibentuk oleh masyarakat, tetapi juga memiliki kemampuan untuk membangun dan mengarahkan masyarakat.

Melengkapi perspektif tersebut, Mills (1994) juga menempatkan analisis wacana sebagai reaksi terhadap linguistik tradisional yang hanya berfokus pada

struktur gramatikal tanpa mempertimbangkan bagaimana bahasa dipakai dalam praktik sosial. Mengikuti Foucault, Mills menjelaskan bahwa wacana dapat dipahami dalam tiga level: pertama, level konseptual-teoretis yang memandang wacana sebagai kumpulan pernyataan yang memiliki efek dalam realitas sosial; kedua, level penggunaan yang mengelompokkan pernyataan berdasarkan kategori-kategori seperti feminisme atau imperialisme; dan ketiga, level metode penjelasan yang melihat wacana sebagai praktik yang diatur untuk menjelaskan berbagai pernyataan dalam tatanan sosial tertentu. Walaupun Mills banyak mengkaji representasi perempuan dalam teks sastra, model analisisnya dapat diterapkan secara lebih luas, termasuk pada teks berita, film, atau media digital (Eriyanto, 2008).

Salah satu aspek utama dalam kerangka analisis Mills adalah posisi subjek dan objek. Posisi ini menentukan bagaimana peristiwa dikisahkan, dari sudut pandang siapa narasi disampaikan, serta siapa yang memiliki kuasa untuk menafsirkan peristiwa. Subjek merupakan aktor yang diberikan otoritas untuk melakukan penafsiran dan mengambil posisi dominan dalam konstruksi makna, sedangkan objek adalah pihak yang ditafsirkan, sering kali ditempatkan sebagai pihak yang pasif atau kurang berdaya. Basarah (2019) menegaskan bahwa penentuan posisi ini sangat menentukan arah interpretasi dalam teks karena narator sebagai subjek memiliki kekuasaan untuk mendefinisikan peristiwa secara subjektif. Sobari & Silviani (2019) juga menunjukkan bahwa media kerap kali tidak netral dalam memberikan posisi tersebut; media sering menempatkan kelompok tertentu sebagai pusat narasi (subjek) dan kelompok lain sebagai objek yang hanya

menerima perlakuan atau dipersepsikan melalui sudut pandang pihak lain. Dengan demikian, relasi kuasa tercermin melalui struktur naratif yang membatasi ruang bicara aktor tertentu, terutama perempuan.

Selain posisi subjek dan objek, Mills (dalam Mills dan Mullany, 2011) juga menekankan pentingnya posisi pembaca dalam teks. Menurutnya, teks merupakan hasil negosiasi antara penulis dan pembaca sehingga pembaca harus diposisikan secara jelas dalam keseluruhan konstruksi naratif. Dua mekanisme utama digunakan untuk menempatkan pembaca. Pertama, melalui proses mediasi, yaitu pemilihan karakter yang dianggap sebagai sumber kebenaran sehingga pembaca diarahkan untuk menyelaraskan dirinya dengan karakter tersebut. Kedua, melalui penggunaan nilai-nilai budaya yang telah disepakati secara sosial, sehingga pembaca menggunakan kerangka budaya tersebut untuk menafsirkan teks. Dengan cara ini, pembaca tidak hanya menjadi penerima pesan, tetapi juga aktor sosial yang dibentuk oleh wacana dan pada saat yang sama turut membentuk kembali makna teks. Secara keseluruhan, analisis wacana kritis Sara Mills berupaya mengungkap bagaimana struktur naratif membangun relasi kuasa, bagaimana perempuan direpresentasikan, dan bagaimana pembaca diarahkan untuk menerima atau menolak konstruksi tersebut.

3. Analisis Wacana Model Michel Foucault

Michel Foucault merupakan salah satu pemikir paling berpengaruh abad ke-20 yang pemikirannya mengenai relasi antara kekuasaan, pengetahuan, dan wacana memberikan sumbangan besar bagi analisis wacana kritis. Menurut Foucault

(1969), wacana tidak sekadar dipahami sebagai rangkaian kata ataupun proposisi dalam teks, tetapi sebagai mekanisme produktif yang membentuk gagasan, konsep, nilai, serta efek sosial tertentu. Setiap ide, opini, dan sistem keyakinan yang beredar di masyarakat selalu berada dalam kerangka wacana yang mengaturnya, sehingga wacana tersebut membentuk cara manusia berpikir dan bertindak. Sebagaimana dijelaskan Eriyanto (2001), pemikiran Foucault menekankan hubungan erat antara pengetahuan dan kekuasaan, di mana kekuasaan tidak dipahami sebagai kepemilikan individu atau kelompok, melainkan sebagai praktik yang beroperasi melalui jaringan posisi sosial yang saling berkaitan secara strategis. Dalam perspektif ini, pengetahuan tidak pernah netral, sebab setiap pengetahuan selalu membawa efek kuasa; sebaliknya, kekuasaan selalu memproduksi pengetahuan untuk mempertahankan keberlanjutan apa yang oleh Foucault disebut sebagai *rezim kebenaran*.

Foucault (1977) menegaskan bahwa kekuasaan modern tidak bergantung pada kekerasan fisik, tetapi bekerja melalui apa yang ia sebut sebagai ekonomi politik kebenaran, yaitu sistem sosial yang menentukan apa yang dianggap benar, sah, dan normal. Pengetahuan bukanlah refleksi pasif dari relasi kuasa, tetapi merupakan bagian inheren dari relasi kuasa itu sendiri. Melalui proses diskursif, kekuasaan membentuk kategori-kategori sosial seperti baik–buruk, normal–tidak normal, dan pantas–tidak pantas, yang kemudian menjadi landasan untuk mengendalikan perilaku individu. Foucault menunjukkan bahwa bahasa, moralitas, hukum, dan norma sosial bekerja sebagai perangkat diskursif yang memproduksi subjek, membentuk identitas, dan mengendalikan tubuh. Pandangan ini sejalan

dengan analisis Bourdieu (1991) mengenai kekerasan simbolik, bahwa kekuasaan yang halus bekerja melalui mekanisme internalisasi, meskipun istilah tersebut tidak secara langsung digunakan oleh Foucault. Melalui operasi wacana, individu bukan hanya diberi definisi sosial tertentu, tetapi juga dibentuk, diarahkan, dan didisiplinkan dalam tubuh maupun pikirannya.

Foucault (1975) memperkenalkan konsep disiplin dan tubuh yang patuh (*docile bodies*), yakni bagaimana kekuasaan modern memproduksi subjek yang tunduk melalui teknik seperti pengawasan, pemeriksaan, klasifikasi, dan normalisasi. Foucault menggunakan model panopticon karya Jeremy Bentham untuk menggambarkan bagaimana kekuasaan bekerja dalam masyarakat modern: individu tidak perlu diawasi secara langsung untuk patuh, karena ketidakpastian mengenai pengawasan membuat individu menginternalisasi kontrol tersebut. Mekanisme pengawasan ini menciptakan bentuk kekuasaan yang amat halus (mirip dengan apa yang disebut Bourdieu sebagai kekerasan simbolik) karena membuat individu mendisiplinkan dirinya sendiri tanpa paksaan fisik. Foucault (1975) menunjukkan bahwa kekuasaan modern bersifat produktif yaitu tidak hanya menindas, tetapi juga menghasilkan pengetahuan, identitas, dan norma yang membentuk tindakan manusia sehari-hari.

Foucault (1972) menguraikan bahwa produksi wacana merupakan proses fundamental dalam pembentukan realitas sosial. Wacana tidak hanya berisi pernyataan, tetapi memiliki aturan-aturan yang menentukan bagaimana suatu objek dapat dibicarakan, siapa yang boleh berbicara, dan perspektif mana yang dianggap sah. Struktur diskursif inilah yang membuat objek tampak nyata dan dapat dikenali.

Meskipun objek fisik tidak berubah, struktur wacana dapat mengubah cara masyarakat memahami dan memaknai objek tersebut. Seperti dijelaskan kembali oleh Eriyanto (2001), wacana membentuk narasi tertentu yang kemudian diterima sebagai representasi sah dari realitas budaya kelompok sosial tertentu. Foucault (1972) juga menyoroti adanya wacana terpinggirkan, yaitu wacana-wacana yang tersisih karena tidak mendapat legitimasi dari struktur kekuasaan dominan. Dalam masyarakat, berbagai wacana hadir dan bersaing, namun kekuasaan selalu memilih dan mendukung wacana tertentu sehingga menjadi dominan, sementara wacana alternatif menjadi tersingkir atau bahkan dianggap tidak sah. Dominasi wacana ini menciptakan batas-batas pengetahuan dan interpretasi, sehingga pemahaman masyarakat terhadap objek sosial dibatasi oleh kerangka diskursif yang sudah mapan. Oleh karena itu, analisis wacana menurut Foucault harus menelaah bagaimana wacana diproduksi, bagaimana ia memperoleh status dominan, serta bagaimana ia mengeliminasi wacana lain yang berpotensi menantang tatanan pengetahuan dan kekuasaan tersebut.

4. Kekerasan Simbolik

Kekerasan secara luas dijelaskan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan oleh seseorang kepada seseorang yang lain yang mengakibatkan masalah jasmani (raga) dan rohani (jiwa). Sebutan kekerasan dipakai untuk menunjukkan sikap, tindakan baik yang secara terang-terangan maupun tersembunyi, baik yang bersifat agresif maupun defensif yang dibarengi dengan penggunaan kekuatan fisik pada pihak lain (Rasyid, 2013:90). Kekerasan merupakan tindakan atau perilaku yang

merugikan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, yang dilakukan dengan tujuan untuk menyakiti atau memaksa individu atau kelompok lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan diartikan sebagai perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera, kerusakan fisik, atau rasa tidak nyaman pada orang lain. Kekerasan mencakup tindakan-tindakan yang melibatkan paksaan atau dominasi, baik secara langsung maupun tidak langsung (Siregar, 2013).

Kekerasan simbolik adalah kekerasan yang beroperasi di bawah ketidaksadaran pelaku maupun korbannya sehingga bersifat nir sadar dan laten sebagai akibat langsung dari adanya perbedaan, pemisahan, ketidaksamaan, ketidaksetaraan atau ketidakseimbangan dalam setiap hubungan sosial yang beragam. Kekerasan simbolik juga dapat diartikan sebagai kekerasan yang kasat mata, tidak tampak tapi berdampak besar namun sebenarnya bentuk kekerasan ini mudah untuk diamati. Bentuk kekerasan simbolik memang bukan sebuah kekerasan yang mudah dilihat wujudnya, namun sebenarnya bentuk kekerasan simbolik sangat mudah diamati dan sering banyak terjadi salah satunya dalam media massa. Menurut Bourdieu (dalam Martono 2012:39) konsep kekerasan simbolik terlihat dari upaya aktor-aktor sosial dominan menerapkan suatu makna sosial dan representasi realitas yang diinternalisasikan kepada aktor lain sebagai sesuatu yang alami dan absah, bahkan makna sosial tersebut dianggap benar oleh aktor lain. Konsep kekerasan simbolik menurut Bourdieu juga merupakan sebuah mekanisme yang digunakan suatu kelompok dominan dalam struktur masyarakat untuk memaksakan secara halus habitus (ideologi, budaya, kebiasaan atau gaya hidup) terhadap kelompok minoritas. Kekerasan ini tidak dirasakan sebagai bentuk

kekerasan secara fisik karena dilakukan dengan mekanisme penyembunyian kekerasan yang dimiliki menjadi sesuatu yang diterima sebagai yang memang seharusnya demikian. Kekerasan simbolik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bentuk kekerasan yang ada dalam media massa daring khusus perempuan, yang secara halus dan samar melalui representasi tubuh perempuan sehingga pembaca tidak menyadari dan merasakannya sebagai sebuah paksaan. Kekerasan simbolik yang beroperasi melalui wacana dan atau bahasa dalam komunikasi sehari-hari dan biasanya menjajah perilaku, sikap, dan cara berpikir tapi diterima dengan baik oleh korbannya. Kekerasan simbolik dalam relasi sosial seorang perempuan dengan penggambaran sebagaimana akan menguasai seluruh sisi kehidupan perempuan, dari sisi nalar, sikap hidup, kondisi psikis sampai tindakan nyata. Kekerasan simbolik adalah pintu gerbang menuju ke kekerasan psikologis dan beresiko ke kekerasan fisik (Haryatmoko, 2010: 130).

Menurut Pierre Bourdieu (1991), kekerasan simbolik adalah bentuk kekerasan yang halus, tidak terlihat, dan seringkali tidak disadari oleh pelaku maupun korbannya. Berbeda dengan kekerasan fisik atau verbal yang kentara, kekerasan simbolik bekerja melalui sistem simbol, bahasa, dan representasi budaya yang diterima sebagai hal yang normal atau alami dalam masyarakat. Kekerasan ini terjadi ketika kelompok dominan berhasil memaksakan pandangan dunia, nilai-nilai, dan kategori-kategori mereka kepada kelompok yang didominasi. Kelompok yang didominasi kemudian menginternalisasikan pandangan tersebut sebagai kebenaran, bahkan jika itu merugikan mereka sendiri. Akibatnya, dominasi sosial dapat terus berlangsung tanpa adanya perlawanan yang berarti, karena

ketidaksetaraan dipandang sebagai sesuatu yang wajar dan bukan sebagai hasil dari paksaan.

Dalam kerangka pemikiran Pierre Bourdieu (1991), kekerasan simbolik tidak dapat dilepaskan dari beberapa konsep kunci, yaitu habitus, modal, ranah, dan doxa. Habitus merujuk pada sistem disposisi yang terbentuk melalui pengalaman sosial individu dan terinternalisasi secara mendalam, sehingga membentuk cara berpikir, merasakan, dan bertindak seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks kekerasan simbolik, habitus kelompok dominan sering kali diposisikan sebagai standar yang dianggap wajar dan universal, lalu secara halus dipaksakan kepada kelompok yang terdominasi tanpa disadari sebagai bentuk kekerasan. Selain habitus, Bourdieu juga memperkenalkan konsep modal yang mencakup modal ekonomi, modal budaya, modal sosial, dan modal simbolik. Modal ekonomi berkaitan dengan sumber daya finansial dan material, sementara modal budaya meliputi pengetahuan, keterampilan, pendidikan, dan selera yang dihargai dalam masyarakat. Modal sosial merujuk pada jaringan relasi dan koneksi sosial, sedangkan modal simbolik merupakan bentuk pengakuan, prestise, atau kehormatan yang dilekatkan pada berbagai jenis modal lainnya. Kekerasan simbolik bekerja melalui mekanisme legitimasi, yaitu ketika kepemilikan modal tertentu diakui sebagai sesuatu yang sah dan bernilai, sehingga memperkuat posisi dominan pihak tertentu. Proses tersebut berlangsung dalam ranah, yaitu ruang sosial tempat individu dan kelompok saling berkompetisi untuk memperoleh dan mempertahankan modal, seperti ranah pendidikan, politik, seni, dan media. Dalam setiap ranah, aturan dan hierarki tertentu berlaku dan sering kali menguntungkan

kelompok dominan. Selanjutnya, doxa berperan sebagai seperangkat asumsi, kepercayaan, dan kategori pemikiran yang diterima secara luas dan tidak dipertanyakan oleh para pelaku sosial. Doxa membuat relasi dominasi tampak alamiah dan wajar, sehingga sifat arbitrer dari kekuasaan dan ketimpangan sosial menjadi tersembunyi. Melalui interaksi antara habitus, modal, ranah, dan doxa inilah kekerasan simbolik bekerja secara halus namun efektif dalam mereproduksi ketidakadilan sosial.

5. Representasi Kekerasan Simbolik terhadap Perempuan

Santoso (2022:4-5) menjelaskan bahwa representasi memiliki peran penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap perempuan. Ketika perempuan terus-menerus direpresentasikan sebagai pihak yang lemah, pasif, emosional, atau bermasalah, representasi tersebut secara simbolik menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Representasi semacam ini tidak hanya mencerminkan realitas sosial, tetapi juga memproduksi dan memperkuat relasi kuasa patriarkis. Kekerasan simbolik terhadap perempuan merupakan bentuk kekerasan yang bekerja secara halus melalui bahasa, simbol, norma, dan representasi sosial. Kekerasan ini tidak selalu disadari sebagai kekerasan karena berlangsung dalam praktik yang dianggap wajar, alamiah, dan sah secara budaya maupun sosial. Dalam perspektif sosiologi feminis, kekerasan simbolik menjadi mekanisme utama yang melanggengkan ketimpangan gender tanpa paksaan fisik. Santoso (2022:25) memaparkan bahwa kekerasan simbolik terhadap perempuan sering kali muncul melalui bahasa dan narasi yang menyalahkan perempuan atas

situasi yang dialaminya. Dalam banyak teks sosial dan budaya, perempuan digambarkan sebagai penyebab konflik, sumber masalah moral, atau pihak yang gagal menjalankan peran sosialnya. Santoso juga menegaskan bahwa mekanisme ini bekerja melalui wacana yang menempatkan perempuan sebagai objek pembicaraan, bukan sebagai subjek yang memiliki suara dan agensi.

Pandangan tersebut sejalan dengan Kustini (2021:2-3) yang menunjukkan bahwa dalam konteks keluarga dan perkawinan, perempuan kerap mengalami kekerasan yang tidak selalu tampak secara fisik. Kekerasan tersebut hadir dalam bentuk pembatasan peran, pembenaran subordinasi, serta pelabelan moral yang merugikan perempuan. Praktik-praktik ini dilegitimasi melalui norma sosial, budaya, agama, dan bahkan regulasi negara, sehingga diterima sebagai sesuatu yang wajar. Lebih lanjut, Kustini menegaskan bahwa keluarga sering direpresentasikan sebagai ruang aman dan harmonis, padahal dalam praktiknya dapat menjadi ruang terjadinya ketidakadilan dan kekerasan terhadap perempuan. Representasi ideal tentang keluarga ini justru menutupi pengalaman perempuan yang mengalami tekanan, pengendalian, dan kekerasan simbolik dalam kehidupan domestik. Dalam konteks ini, kekerasan simbolik bekerja dengan cara membungkam pengalaman perempuan dan mengaburkan ketimpangan struktural.

Kekerasan simbolik terhadap perempuan juga tampak dalam representasi institusional. Kustini menunjukkan bahwa negara dan institusi agama berperan dalam membentuk citra perempuan sebagai pihak yang harus dilindungi sekaligus dikendalikan. Perempuan direpresentasikan sebagai subjek yang membutuhkan pengawasan, sehingga posisinya menjadi tidak setara dengan laki-laki (Kustini,

2021:11–15). Dalam teks budaya seperti film, kekerasan simbolik terhadap perempuan sering hadir melalui alur cerita, penokohan, dan sudut pandang narasi. Perempuan dapat direpresentasikan sebagai korban opini publik, objek penghakiman moral, atau pihak yang harus menerima konsekuensi sosial atas peristiwa yang berada di luar kendalinya. Santoso menegaskan bahwa representasi semacam ini memperlihatkan bagaimana ideologi patriarki bekerja secara tidak langsung melalui teks (Santoso, 2022:25).

Kustini juga menyoroti bagaimana pengalaman perempuan dalam perkawinan bermasalah, perceraian, atau relasi kuasa yang timpang sering direpresentasikan sebagai kegagalan individu perempuan. Cara pandang ini merupakan bentuk kekerasan simbolik karena memindahkan tanggung jawab struktural kepada individu perempuan dan meniadakan konteks sosial yang melingkupinya (Kustini, 2021:15–18). Meskipun demikian, kekerasan simbolik tidak bersifat mutlak dan tidak dapat digugat. Santoso menekankan adanya ruang resistansi melalui produksi representasi tandingan yang menempatkan perempuan sebagai subjek yang aktif dan berdaya (Santoso, 2022:22–24). Berdasarkan uraian tersebut, representasi kekerasan simbolik terhadap perempuan dapat dipahami sebagai hasil dari relasi kuasa yang bekerja melalui bahasa, narasi, dan simbol dalam teks sosial dan budaya.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian tentang representasi perempuan, kekerasan simbolik, dan analisis wacana kritis telah menjadi perhatian berbagai peneliti. Mulai dari pendekatan, objek, hingga ke fokus yang beragam. Meskipun demikian, setiap penelitian

memberikan kontribusi yang penting sebagai dasar dalam penelitian ini. Berikut ini merupakan uraian penjelasan dari penelitian-penelitian yang relevan.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Munfarida (2014) dengan judul “Analisis Wacana Kritis dalam Perspektif Norman Fairclough” menjadi salah satu kajian awal yang secara komprehensif memperkenalkan konsep analisis wacana kritis. Norman Fairclough hadir dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) sebagai upaya merekonstruksi teori wacana yang ada. Fairclough mengkritik pendekatan sebelumnya yang dianggap tidak mampu menjelaskan relasi antara bahasa, kekuasaan, dan struktur sosial secara utuh. Melalui sintesis tiga tradisi utama (linguistik, tradisi interpretatif, dan sosiologi) Fairclough menawarkan model analisis wacana yang terdiri atas tiga dimensi, yaitu teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Ketiga dimensi ini memiliki fokus dan prosedur analisis yang berbeda, namun saling berkaitan secara dialektis. Namun, penelitian Munfarida tidak menyentuh aspek empiris berupa analisis film maupun isu kekerasan simbolik terhadap perempuan, sehingga kontribusinya lebih bersifat konseptual daripada aplikatif.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Novarisa (2019) dengan judul penelitian “Dominasi Patriarki Berbentuk Kekerasan Simbolik terhadap Perempuan pada Sinetron” menghadirkan perspektif yang berbeda karena menggunakan media sinetron sebagai objek kajian. Dengan memadukan teori kekerasan simbolik Pierre Bourdieu dan model Sara Mills, penelitian ini menyoroti bagaimana sinetron berperan sebagai arena reproduksi nilai patriarki melalui simbol, habitus, dan representasi naratif. Perempuan dalam sinetron digambarkan mengalami penundukan secara simbolik melalui penggambaran stereotip seperti tunduk, pasif, dan bergantung secara emosional maupun material.

Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi antara Mills dan Bourdieu dapat diterapkan secara simultan untuk mengkaji representasi media. Namun demikian, penelitian Novarisa berada pada konteks sinetron yang cenderung memiliki pola naratif repetitif, representasi stereotip, dan segmentasi penonton yang berbeda dengan film Budi Pekerti. Selain itu, penelitian tersebut tidak mengembangkan temuan untuk konteks pendidikan, sehingga perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada ruang lingkup objek, kedalaman analisis wacana, serta tujuan penggunaan teori.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rani (2023) dengan judul “Representasi Perempuan dalam Film Before, Now & Then (Nana)” lebih relevan dengan penelitian ini karena sama-sama menggunakan media film sebagai objek penelitian. Film yang dikaji adalah Before, Now & Then (Nana) yang berangkat dari konteks sejarah Indonesia pada era 1960-an. Penelitian tersebut menggunakan model analisis wacana kritis Sara Mills untuk melihat bagaimana narasi dalam film menempatkan perempuan sebagai subjek ataupun objek, serta bagaimana perspektif pencerita mengonstruksi identitas dan pengalaman perempuan. Meskipun demikian, penelitian tersebut tidak memanfaatkan teori Pierre Bourdieu untuk mengkaji habitus, modal, maupun mekanisme kekerasan simbolik. Selain itu, konteks sosial yang digambarkan film Nana berbeda secara signifikan dengan film Budi Pekerti yang menggambarkan dinamika kekuasaan dalam konteks kontemporer seperti media sosial, institusi sekolah, birokrasi, dan tekanan moral masyarakat modern.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Santoso (2022) dengan judul “Pertarungan Simbolik dalam Wacana Perpanjangan PPKM”, yang menelaah wacana perpanjangan PPKM dengan pendekatan teori Bourdieu. Penelitian tersebut mengungkap bahwa arena politik dan media saling memperebutkan legitimasi simbolik melalui modal sosial, modal kultural, dan modal simbolik. Konsep pertarungan simbolik yang dipaparkan memberikan gambaran penting tentang bagaimana dominasi dapat bekerja melalui bahasa dan simbol. Meskipun penelitian ini memberikan pemahaman teoretis mengenai kekuasaan dalam wacana, objek kajiannya berupa teks kebijakan dan pemberitaan publik, bukan representasi perempuan dalam film. Selain itu, penelitian tersebut tidak menggunakan pendekatan Sara Mills sehingga tidak membahas bagaimana perspektif naratif dan konstruksi posisi subjek objek bekerja dalam teks.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Savitri dan Putri (2024) dengan judul “Analisis Wacana Kritis Sara Mills terhadap Marginalisasi Perempuan dalam Film Pendek Sebab Bajing Bedebah Karya SPRD Production”, yang mengkaji film pendek Sebab Bajing Bedebah dengan mengintegrasikan model Sara Mills dan teori Bourdieu. Penelitian ini melihat marginalisasi perempuan sebagai proses simbolik yang dijalankan melalui struktur wacana dan norma sosial. Namun, film yang dikaji adalah film pendek yang memiliki ruang naratif terbatas sehingga kompleksitas persoalan sosial, interaksi karakter, dan dinamika kekuasaan yang dianalisis tidak sekompleks film Budi Pekerti. Selain itu, penelitian tersebut tidak mengaitkan hasil analisis dengan implikasi pembelajaran Bahasa Indonesia. Dengan demikian, meskipun memiliki

kesamaan metodologis, penelitian ini tetap memiliki ruang kontribusi yang berbeda.

Jika ditinjau secara keseluruhan, penelitian-penelitian yang relevan tersebut telah memberikan landasan penting tentang bagaimana perempuan direpresentasikan dalam media, bagaimana kekuasaan bekerja melalui simbol dan wacana, serta bagaimana analisis kritis dapat dioperasikan dalam telaah media. Namun, belum terdapat penelitian yang secara khusus menelaah film Budi Pekerti. Belum ada kajian yang secara mendalam mengintegrasikan teori Sara Mills, Michel Foucault, dan teori kekerasan simbolik Bourdieu pada film tersebut. Belum ada juga penelitian yang menjadikan hasil analisis wacana sebagai dasar pengembangan pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah. Oleh karena itu, penelitian ini menempati posisi yang unik karena tidak hanya menyumbangkan analisis representasi kekerasan simbolik terhadap perempuan dalam film, tetapi juga menawarkan implikasi bagi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah.

C. KERANGKA BERPIKIR

